



# **LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA TANJUNGPINANG**

**MASA RESES  
MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2023 - 2024**

**TANGGAL, 28 FEBRUARI – 3 MARET 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA TANJUNGPINANG  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2023-2024  
TANGGAL, 28 FEBRUARI – 3 MARET 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Sedangkan di dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f juga menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja di masa reses yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) daerah, yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN, dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

## **I.2 Dasar Kegiatan**

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 15 Januari 2024.

## **I.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Mendapatkan informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat, dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/ badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kota Tanjungpinang.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Kota Tanjungpinang secara umum terkait proses legislasi, dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

#### I.4 Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si (A-425). Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NO. ANGG</b>	<b>N A MA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>DAPIL</b>
1.	A-425	Dr.Hj.KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI	PKS	DKIJKTII
2.	A-177	TUTI NUSANDARI ROOSDIONO	Anggota	PDIP	JATENGI
3.	A-190	RAHMAD HANDOYO,S.PI.,M.M	Anggota	PDIP	JATENG V
4.	A-200	Dr.DEWIARYANI,M.Si	Anggota	PDIP	JATENG IX
5.	A-212	KRISDAYANTI	Anggota	PDIP	JATIM V
6.	A-269	DELIA PRATIWI SITEPU,SH	Anggota	GOLKAR	SUMUT III
7.	A-293	Dra.WENNY HARYANTO, SH	Anggota	GOLKAR	JABAR VI
8.	A-66	dr.H.SUIRSYAM,M.Kes,MMR	Anggota	Gerindra	SUMBARI
9.	A-134	Dra.Hj.RUSKATI ALI BAAL	Anggota	Gerindra	SULBAR
10.	A-380	NURHADI,S.Pd	Anggota	Nasdem	JATIM VI
11.	A-380	DRS.H.ACEP ADANG RUHIAT,M.Si	Anggota	PKB	JABAR XI
12.	A-531	Drs.H.ZULFIKAR ACHMAD	Anggota	Demokrat	JAMBI
13.	A-470	Sy.ANAS THAHIR	Anggota	PPP	JATIM III

### **I.5 Kegiatan Kunjungan Kerja**

Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Tanjungpinang akan dilakukan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan instansi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan sosial yaitu:

1. Walikota Tanjung Pinang
2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang
4. Kepala BP3MI Kepulauan Riau;
5. Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau;
6. Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan (Kepri, Riau, Sumbar, Jambi);
7. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang;
8. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau;
9. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang;
10. Perwakilan Loka POM Tanjung Pinang;
11. Direktur RSUD Kota Tanjung Pinang; dan
12. Perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjung Pinang.

Didampingi oleh :

1. Kementerian Kesehatan RI;
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI;
3. Badan POM RI;
4. BKKBN RI;
5. BP2MI RI;
6. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
7. Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan; dan
8. Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

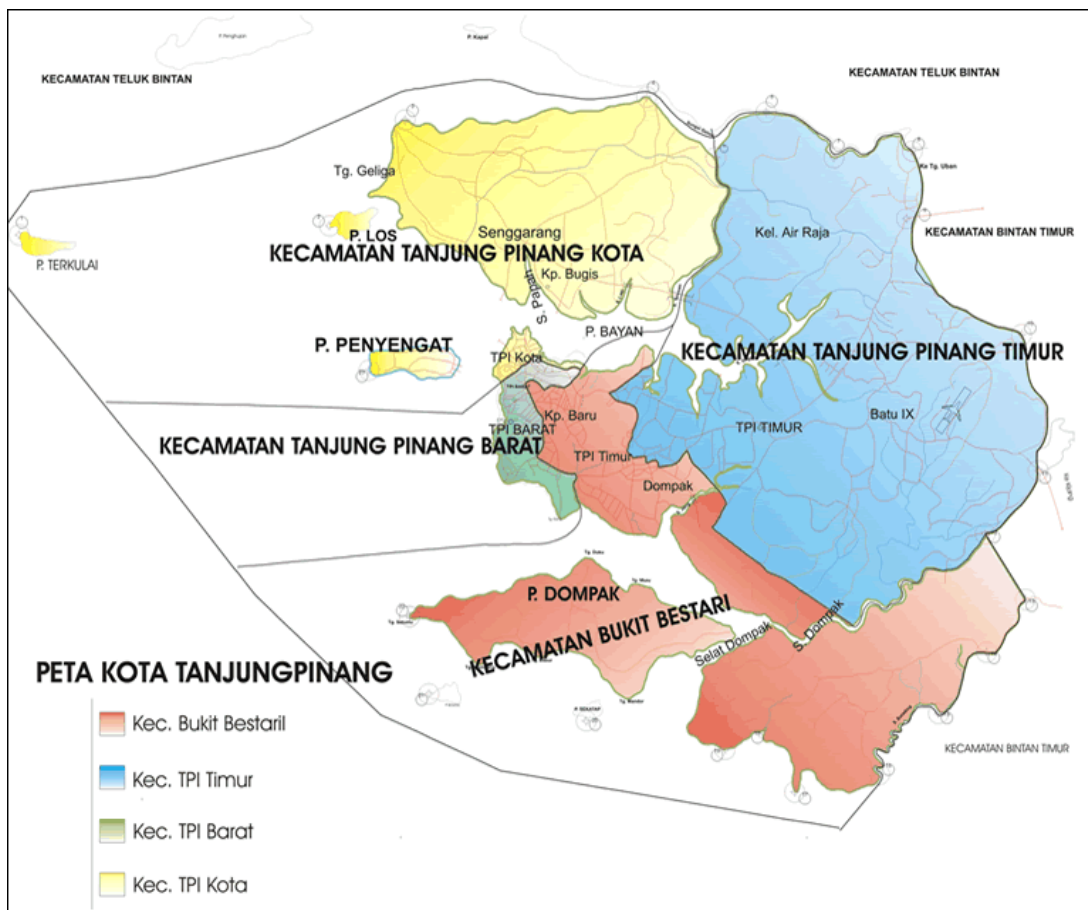
## **II. GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan. Tanjungpinang resmi terbentuk sebagai daerah otonom pada 21 Juni 2001 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2001. Sebelum menjadi daerah otonom, Tanjungpinang merupakan kota administratif yang menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau di Provinsi Riau. Dengan berubahnya kebijakan pada tahun 1999, terutama dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur wilayah pemerintahan Indonesia hanya terdiri atas wilayah provinsi, kabupaten atau kota sehingga membuat status Tanjungpinang dapat ditingkatkan menjadi kota otonom. Tanjungpinang akhirnya diresmikan bersama dengan 11 kota lainnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta yang mana tanggal ini selanjutnya dirayakan sebagai hari jadi Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang memiliki lokasi yang cukup strategis terutama karena berbatasan langsung dengan Kota Batam (di sebelah Barat) yang menjadi

kawasan perdagangan bebas serta berdekatan dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan dunia. Selain itu, Kota Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.

Dilihat dari luas wilayahnya, Kota Tanjungpinang termasuk kota kecil dengan luas wilayah sebesar 144,56 km<sup>2</sup>. Secara administratif, kota Tanjungpinang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 220.812 penduduk. Heterogenitas penduduk di Kota Tanjungpinang sangatlah terasa dengan adanya berbagai etnis yang hidup berdampingan seperti etnis Melayu sebagai penduduk asli, dan beberapa etnis lainnya yang merupakan pendatang seperti Batak, Minang, Jawa, Tionghoa, Bugis (Sulawesi) dan dari daerah lainnya di wilayah Sumatera serta wilayah lainnya. Dari segi mata pencaharian penduduk, mayoritasnya bermata pencaharian di sektor jasa, industri dan pertanian.



Peta Kota Tanjungpinang

## **Ekonomi**

Produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 19,66 triliun. Dari total PDRB tersebut, perekonomian Kota Pangkalpinang terbesar ditopang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 29 persen. Diikuti oleh Konstruksi sebesar 28,77 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,31 persen.

Untuk sektor konstruksi, kendati kontribusinya terbesar kedua terhadap PDRB, namun dalam kurun lima tahun terakhir kontribusinya cenderung menurun. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan cenderung naik dalam kurun waktu yang sama.

Adapun kontribusi di industri pengolahan sebesar 6,64 persen pada tahun 2020 dan cenderung tumbuh positif dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2019, terdapat 17 perusahaan besar dan sedang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.081 di kota ini. Sementara itu, industri berskala kecil tercatat sebanyak 3.845 usaha. Dari jumlah itu, sebanyak 2.617 usaha bergerak di industri makanan sedangkan industri non makanan sebanyak 1.228 usaha.

Di sisi keuangan daerah, total pendapatan Kota Tanjungpinang sebesar Rp 988,04 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 145,79 miliar, dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 738,50 triliun serta pendapatan lain-lain sebesar Rp 103,75 miliar. Kota Tanjungpinang memiliki cukup banyak daerah pariwisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih dua mil dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pantai Trikora dengan pasir putihnya, dan Pantai Buatan yaitu Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pamanis atau wajah kota (waterfront city).

Di Pulau Penyengat terdapat banyak bangunan bersejarah dan makam yang telah dijadikan situs cagar budaya. Di pulau ini juga dijumpai kelenteng atau vihara di kawasan Kampung Bugis dan Senggarang, yang sekaligus menjadi kawasan wisata religi. Wisata lainnya juga dapat ditemukan di Pantai Impian, Tugu Pensil, Tepi Lau, dan sebagainya.

Untuk mendukung potensi pariwisata tersebut, pada tahun 2019, Kota Tanjungpinang telah memiliki 48 hotel yang 8 diantaranya hotel berbintang sedangkan 40 hotel lainnya hotel non bintang. Kegiatan promosi hotel juga terintegrasi dengan promosi destinasi pariwisata di kota ini.

## **Pemerintahan**

Sejak ditetapkan sebagai kota administratif hingga kini, Tanjungpinang telah dipimpin oleh tujuh kepala daerah. Wali Kota administratif pertama adalah Asmuni Hasymi yang menjabat selama dua tahun (1983-1985). Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Sani yang menjabat selama 10 tahun dari tahun 1985 hingga 1995. Dilanjutkan oleh Andi Rivai Siregar (1993-1995), dan Suryayati Abdul Manan (1995-2000).

Setelah resmi dibentuk sebagai kota baru pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Tanjungpinang dipimpin oleh pejabat wali kota Suryatati A Manan selama lima tahun

(1995-2000). Selanjutnya Suryatati A. Manan menjabat Wali Kota Tanjungpinang dari 2001 hingga 2013.

Kepemimpinan di Kota Tanjungpinang diteruskan oleh Wali Kota Lis Darmansyah selama lima tahun (2013-2018). Kemudian Wali Kota Tanjungpinang dijabat oleh Syahrul yang terpilih dalam Pilkwako tahun 2018 dengan meraih 42.559 suara, mengalahkan petahana Lis Darmansyah yang hanya meraih 40.160 suara.

Namun pada tahun 2020 lalu, Syahrul meninggal dunia sehingga sisa masa jabatan Wali Kota Tanjungpinang periode 2018-2023 diteruskan oleh Rahma yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Tanjungpinang. Pada 28 Juni 2021, terpilih wakil wali kota Tanjungpinang Endang Abdullah yang telah dilantik oleh Gubernur Kepulauan Kepri, Ansar Ahmad.

Secara administratif, Kota Tanjungpinang terdiri dari empat kecamatan dan 18 kelurahan serta 166 RW dan 673 RT. Keempat kecamatan itu adalah Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Untuk mendukung jalannya pemerintahan, Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.253 orang yang terdiri dari 1.262 pegawai laki-laki (38,90 persen) dan 1.950 pegawai perempuan (61,10 persen). Dari jumlah tersebut, sebanyak 56,91 persen di antaranya berpendidikan tinggi.

## **Penduduk**

Penduduk Kota Tanjungpinang menurut sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 227.663 yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 114.684 orang dan penduduk perempuan sebanyak 112.979. Dengan proporsi tersebut, sex ratio nilainya diatas 100 yaitu sebesar 102. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada 102 penduduk laki-laki di Kota Tanjungpinang.

Komposisi penduduk dalam piramida penduduk Kota Tanjungpinang terlihat kelompok usia 35-39 tahun lebih menonjol dibanding kelompok usia lainnya. Proporsi usia produktif sebesar 69,09 persen dari total penduduk. Sementara proporsi penduduk yang berusia di bawah 15 tahun sebanyak 26,06 persen, dan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) hanya sebesar 4,85 persen.

Penduduk Tanjungpinang didominasi oleh Suku Melayu yang merupakan penduduk asli dan kelompok suku bangsa yang dominan di Tanjungpinang. Selain itu, terdapat pula suku Bugis dan Tionghoa yang sudah ratusan tahun berbaur dengan suku Melayu dan menjadi penduduk tetap semenjak zaman Kesultanan Johor Riau dan Residentie Riouw.

Suku Bugis awalnya menetap di Kampung Bugis dan suku Tionghoa banyak menempati jalan Merdeka dan Pagar Batu. Sedangkan suku Jawa mulai ramai mendatangi Tanjungpinang pada tahun 1960. Pemukiman awal suku Jawa terletak di Kampung Jawa.

Bahasa yang digunakan di Tanjungpinang adalah bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu di kota ini hampir sama dengan bahasa Melayu yang digunakan di Singapura, Johor, Pahang, Selangor, hingga Malaka, karena memang sejak zaman pemerintahan kesultanan Riau Lingga dahulu Tanjungpinang sudah menjadi pusat budaya Melayu



bersama Singapura. Selain itu, bahasa Tiochiu dan Hokkien juga banyak digunakan oleh suku Tionghoa di Kota Tanjungpinang.

Dari sisi pekerjaan, sektor tersier seperti Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel, Angkutan dan Komunikasi serta Jasa-jasa semakin mendominasi pasar kerja di Kota Tanjungpinang dengan persentase sebesar 80,19 persen. Kemudian diikuti oleh sektor sekunder (Industri, Listrik Gas dan Air serta Konstruksi) sebesar 15,10 persen. Sementara pekerja di Sektor Primer yang mencakup sektor Pertanian dan Pertambangan hanya sebesar 4,70 persen.

## **Pendidikan**

Pendidikan merupakan pondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa didukung oleh pendidikan yang kuat. Pendidikan menjadi jembatan dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Persentase penduduk yang melek huruf di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 mencapai 99,2 persen, sisanya penduduk yang buta huruf sebesar 0,8 persen. Jika dibandingkan Angka Melek Huruf tahun 2021 berada pada angka 99,08 persen dan angka buta huruf 0,92 persen. Pada tahun 2020 Angka Melek huruf lebih rendah jika dibanding tahun 2021 yang hanya mencapai 98,21 persen dan angka buta huruf mencapai 1,79 persen. Ini membuktikan program pemerintah dalam “memberantas” buta huruf dapat dikatakan berhasil.

Menurut jenis kelamin, Angka Melek Huruf penduduk laki-laki selama tahun 2020—2022 selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki sedikit lebih unggul dibandingkan perempuan dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Pada tahun 2022 AMH penduduk perempuan sebesar 97,65 persen, lebih kecil dari AMH penduduk laki-laki pada tahun 2022 (99,32 persen).

Sebagai Ibukota provinsi, Kota Tanjungpinang masih memiliki penduduk yang tidak mempunyai ijazah sebanyak 4,98 persen. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang memiliki ijazah DI/DII/DIII yang hanya sebanyak 4,24 persen. Mayoritas penduduk Kota Tanjungpinang menamatkan pendidikan setara SMA sebanyak 35,28 persen. Jika dilihat dari persentase penduduk berdasarkan status pendidikan, persentase terbanyak adalah sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 33,56 persen, sedangkan yang sedang bersekolah di jenjang Perguruan Tinggi hanya sebesar 11,84 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tanjungpinang tahun 2022 pada kelompok umur 7-12 tahun memiliki peluang bersekolah sebesar 99,49 persen. Untuk kelompok umur 13-15 tahun peluang bersekolah sebesar 99,50 persen, sementara peluang bersekolah untuk umur 16-18 semakin menurun dengan persentase sebesar 87,16 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2022, APM pada jenjang pendidikan tingkat SD yaitu sekitar 99,49 persen . Angka ini menunjukkan bahwa 99,49 persen anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD yang berada pada kelompok usia SD. APM pada jenjang pendidikan SMP adalah 82,60 persen dan 72,77 persen di tingkat SMA. APM semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kecenderungan penduduk Indonesia bersekolah tidak tepat waktu/tidak pada umurnya.

### **III. HASIL KUNJUNGAN**

#### **A. BIDANG KESEHATAN**

##### **a. Gambaran Umum**

Derajat hidup masyarakat dalam kesehatan diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Indikator ini menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh individu pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup merupakan alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup untuk Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 mencapai 72,49 tahun. Ini berarti bahwa, bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2022 akan dapat hidup sampai 72 tahun. Angka Harapan Hidup Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018—2022. Pada tahun 2018 Tanjungpinang memiliki AHH sebesar 71,93 dan naik menjadi 72,49 dalam kurun waktu 5 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk adalah Angka Kesakitan yang disebut juga Angka Morbiditas. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik Indikator lain yang perlu dipertimbangkan adalah Rata-rata Lama Sakit. Indikator ini menunjukkan intensitas penyakit sekaligus memberi gambaran mengenai kerugian ekonomi yang diderita penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam bentuk rata-rata lama hari sakit. Semakin kecil angka morbiditas dan rata-rata lama sakit berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Secara umum, angka morbiditas di Kota Tanjungpinang mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2022. Persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggu kegiatan pada tahun 2020 adalah 7,28 persen yang kemudian menurun menjadi 3,38 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022 angka

kesakitan naik menjadi 5,2 persen. Sedangkan rata-rata lama rawat inap penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 adalah 6,37 hari. Ini berarti untuk sehat kembali penduduk kota Tanjungpinang membutuhkan waktu rata-rata 6—7 hari rawat inap.

Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan merupakan prioritas utama pembangunan bidang kesehatan. Salah satu faktor menurunnya angka kematian adalah tempat ibu melahirkan dan siapa yang melakukan pertolongan pertama saat melahirkan. Di Kota Tanjungpinang sekitar 99,53 persen ibu hamil memilih fasilitas kesehatan sebagai tempat melahirkan. Sekitar 0,47 persen memilih rumah sebagai tempat untuk melahirkan. Tidak ada ibu hamil yang memilih tempat lainnya. Untuk pertolongan pertama melahirkan sekitar 67,47 persen ditolong oleh Tenaga Medis, 32,53 persen oleh Bidan, dan tidak ada yang ditolong oleh Non-Tenaga Kesehatan.

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan kondisi wilayah tempat tinggal. Ketersediaan dan jarak ke fasilitas kesehatan akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan ditambah perilaku penduduk itu sendiri. Jumlah fasilitas kesehatan terbanyak adalah posyandu sebanyak 140 unit, kemudian klinik/balai kesehatan sebanyak 48 unit, puskesmas sebanyak 7 unit, polindes 5 unit dan rumah sakit sebanyak 3 unit. Pada tahun 2022, penduduk laki-laki di Kota Tanjungpinang yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sekitar 58,90 persen dan penduduk perempuan sekitar 45,68 persen. Secara umum penduduk Kota Tanjungpinang yang menggunakan Jaminan Kesehatan baik Mandiri maupun PBI sebanyak 52,32 persen. Masih ada sekitar 47,68 persen penduduk tidak menggunakan jaminan kesehatan sama sekali saat mengalami gangguan kesehatan.

## b. Hasil Kunjungan

Kota Tanjung Pinang dalam RPJPD 2005 – 2025 memiliki misi yaitu mewujudkan masyarakat Kota Tanjung yang sehat, cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia. Dengan tujuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut adalah pagu anggaran Kesehatan 2023-2024 di Kota Tanjungpinang.

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Pagu	%	Pagu	%
1	Belanja Operasi	201.455.367.156,-	93,17	191.290.907.652,-	94,78
	a. Belanja Pegawai	107.088.225.939,-	49,53	115.627.397.513,-	57,29
	b. Belanja Barang dan Jasa	94.254.141.217,-	49,59	75.513.510.139,-	37,42
	c. Belanja hibah	113.000.000,-	0,05	150.000.000,-	0,07
2.	Belanja Modal	14.758.510.176,-	6,83	10.526.262.985,-	5,22
	Total Belanja DKP2KB	216.213.877.332,-		201.817.170.637,-	
	APBD Kota Tanjungpinang	1.139.834.701.537,-		1.091.098.096.767,-	-

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan kondisi wilayah tempat tinggal. Ketersediaan dan jarak ke fasilitas kesehatan akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan ditambah perilaku penduduk itu sendiri.

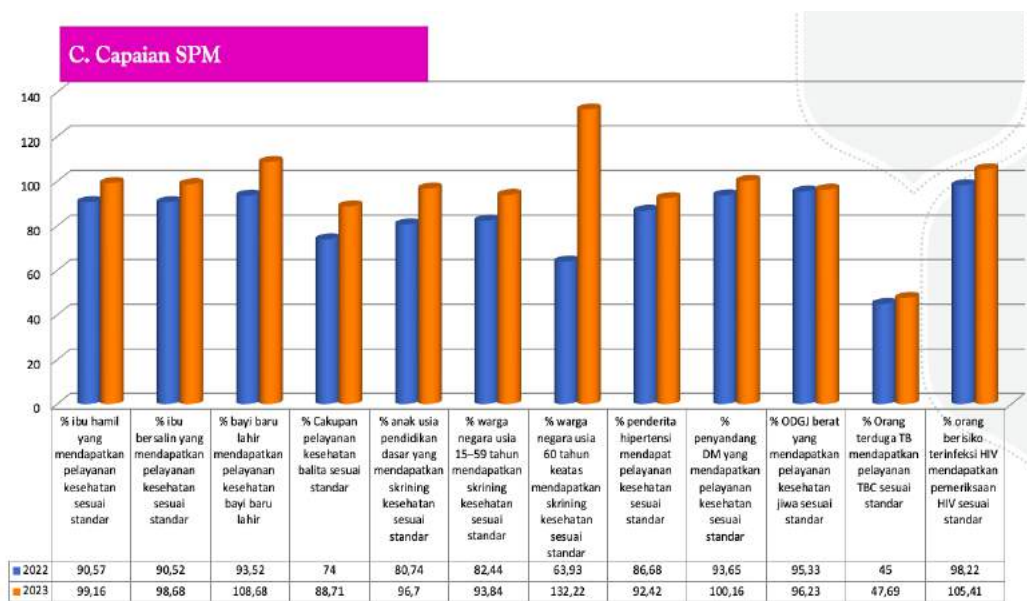
Berikut adalah data capaian pembagunan Kesehatan Kota Tanjungpinang dan jumlah fasilitas Kesehatan yaitu Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), serta jumlah upaya Kesehatan bersumber daya manusia (UKBM), poskeskel, posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja, posbindu beserta data tenaga kesehatan di Kota Tanjungpinang.

No	Uraian	Jumlah
1.	Rumah Sakit	3
2.	Puskesmas	8
3.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	11
4.	Poskeskel	18
5.	Posyandu Lansia	40
6.	Posyandu Balita	145
7.	Posyandu Remaja	16
8.	Posbindu	25

Sumber : Pemerintah Kota Tanjung Pinang

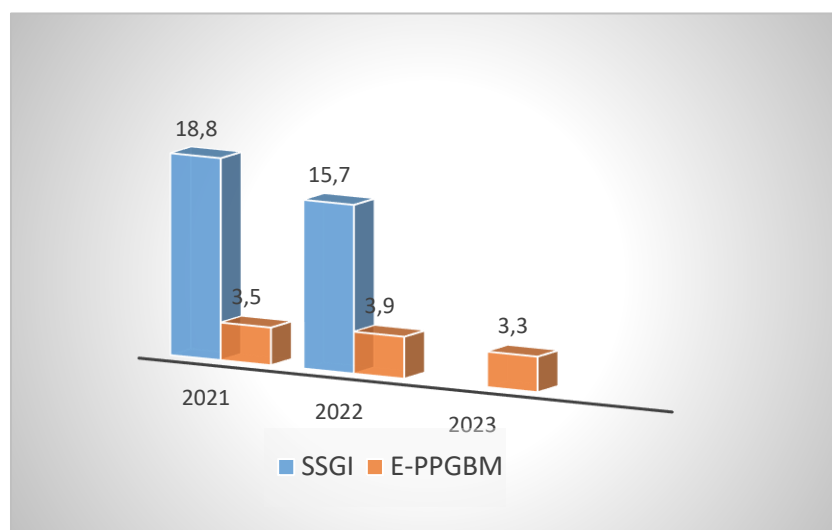
DATA TENAGA KESEHATAN SE-KOTA TANJUNGPINANG												
NO	NAMA KECAMATAN	DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	BIDAN	TENAGA KESEHATAN LAINNYA						TOTAL
						PERAWAT	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	TENAGA GIZI	APOTEKER/ASISTEN APOTEKER	ATLM	SANITARIAN	
1	TANJUNGPINANG TIMUR	57	177	27	192	297	22	12	106	25	11	926
2	TANJUNGPINANG BARAT	27	63	18	44	205	2	7	45	13	3	427
3	TANJUNGPINANG KOTA	33	93	10	78	356	6	8	48	6	5	643
4	BUKIT BESTARI		131	30	78	117	4	5	39	2	3	409
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>117</b>	<b>464</b>	<b>85</b>	<b>392</b>	<b>975</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>238</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>2405</b>

Sumber : Pemerintah Kota Tanjung Pinang



Sumber : pemerintah kota Tanjung Pinang

Berdasarkan data tahun 2023 angka stunting Kota Tanjung pinang berada di 15,7% lebih rendah daripada tahun 2022 yang berada di angka 18%. Pemerintah kota tanjong pinang tetap melanjutkan program penurunan stunting dengan melakukan improvisasi sehingga dapat menurunkan angka stunting agar dapat mencapai target 12% ditahun mendatang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui PKK terus melakukan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi bersama kader-kader posyandu sehingga dapat memberikan pemahaman akan stunting serta dapat melakukan pemetaan dan tindakan terhadap anak yang mengidap stunting sehingga dapat mendapatkan penanganan yang baik.

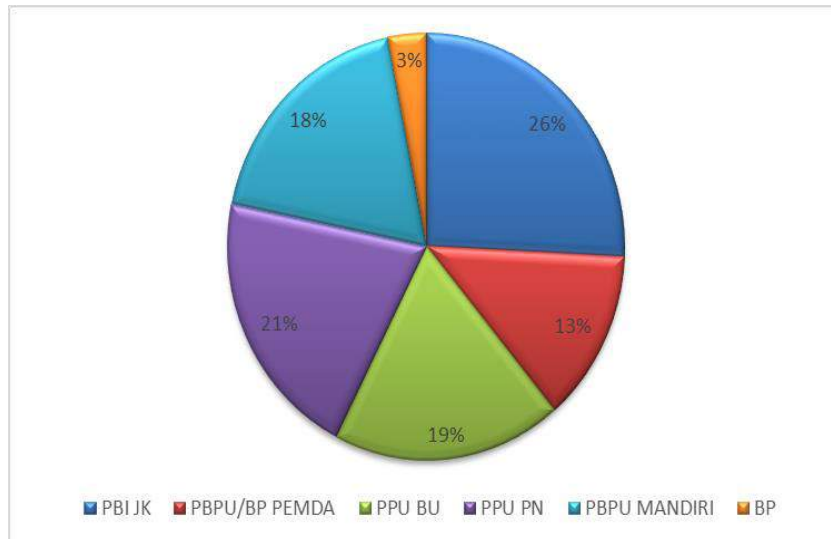


Pemerintah Kota Tanjungpinang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kesehatan dan kerja untuk masyarakat. Pekerja dan masyarakat telah difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, seperti pegawai honorer, PTT, tukang parkir, supir angkutan umum, maupun kelompok nelayan. Begitupun BPJS kesehatan yang telah dimiliki masyarakat baik yang dibiayai Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Berikut kepesertaan JKN Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2022, untuk Kota Tanjungpinang cakupan kepesertaan adalah sebesar 210.349 Jiwa.

NO	KANTOR CABANG	JUMLAH PENDUDUK SMST   2022	PBI JK	PBPU/BP PEMDA	PPU BU	PPU PN	PBPU MANDIRI	BP	TOTAL TERDAFTAR JKN	%	BELUM JKN	KETERANGAN
1	KC BATAM	1.469.157	310.111	71.071	576.810	96.627	294.460	7.333	1.356.412	92,33%	112.745	Mendekati UHC
	KAB. KARIMUN	262.075	61.267	33.640	50.767	27.224	46.301	3.245	222.444	84,88%	39.631	
	KOTA BATAM	1.207.082	248.844	37.431	526.043	69.403	248.159	4.088	1.133.968	93,94%	73.114	Mendekati UHC
2	KC TANJUNGPINANG	632.058	184.707	118.645	95.310	109.673	73.748	9.474	591.557	93,59%	40.501	Mendekati UHC
	KAB. BINTAN	169.447	38.968	23.679	46.143	17.260	26.591	1.729	154.370	91,10%	15.077	Mendekati UHC
	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	48.084	10.829	20.427	2.505	14.511	787	227	49.286	102,50%	1.202	UHC
	KAB. LINGGA	102.150	46.311	24.964	3.832	13.482	4.756	946	94.291	92,31%	7.859	Mendekati UHC
	KAB. NATUNA	82.824	29.150	28.775	3.100	19.635	2.022	579	83.261	100,53%	437	UHC
	KOTA TANJUNG PINANG	229.553	59.449	20.800	39.730	44.785	39.592	5.993	210.349	91,63%	19.204	Mendekati UHC
	TOTAL	2.101.215	494.818	189.716	672.120	206.300	368.208	16.807	1.947.969	92,71%	153.246	

Sampai dengan 31 Desember 2023 total kepesertaan JKN-KIS Kota Tanjung Pinang mencapai 220.464 jiwa (94,46%) dari 231.553 jiwa penduduk Kota Tanjungpinang.





Proporsi terbesar kepesertaan JKN adalah peserta segmen PBI JK sebanyak 56.855 jiwa (26%) dan selanjutnya segmen PPU Penyelenggara Negara sebanyak 45.066 jiwa (21%), PPU Badan Usaha 41.172 Jiwa (19%), PBPU Mandiri sebanyak 41.066 jiwa (18%) serta PBPU/BP pemda 28.751 jiwa (13 %), segmen bukan pekerja sebanyak 6.964 jiwa (3%). Terdapat 12.942 Jiwa (5,54%) penduduk Kota Tanjung Pinang yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk menambah cakupan kepesertaan, antara lain :

- Optimalisasi Kepesertaan PBI JK dengan memastikan terdapat data peserta Cadangan pada SIKS NG melalui Koordinasi secara rutin dengan Dinas Sosial masing-masing Kabupaten Kota.
- Melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan Penyelenggara Negara untuk memastikan semua PPU PN telah terdaftar di BPJS Kesehatan.
- Canvassing dan pemeriksaan kepada Badan usaha dalam rangka memastikan kepesertaan 100% dan kesesuaian Upah.
- Mobile Customer Service (MCS) pada lokasi yang jauh akses dari Kantor Cabang atau Kantor Layanan Kab/Kota BPJS Kesehatan
- Sosialisasi ke Kelurahan dan Kecamatan
- Iklan melalui media cetak dan radio
- Advokasi PBPU kolektif pada Universitas
- PBPU Kolektif dengan pembiayaan dari berbagai donatur termasuk CSR Badan Usaha untuk penduduk yang belum terdaftar JKN dan berada disekitar Badan Usaha
- Forum bersama Pemerintah Daerah untuk dukungan terhadap program JKN salah satunya dengan meningkatkan kuota peserta PBPU/BP Pemda.

Secara Khusus upaya yang telah dilakukan untuk rekrutmen peserta PPU Badan Usaha, antara lain :

- Sinergi dengan lembaga untuk mendapatkan data Badan Usaha potensial seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, APINDO, serta lembaga terkait lainnya.
- Canvassing BU belum teregistrasi.
- telemarketing Badan Usaha.
- Up to 100% untuk Badan Usaha eksisting melalui Penegakan Kepatuhan dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan jika ditemukan Badan Usaha Tidak Patuh.

## **B. BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **a. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang**

Indikator ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang berdasarkan data BPS tahun 2022 adalah bahwa jumlah angkatan kerja sebanyak 110.559 jiwa. Penduduk bekerja terhadap angkatan kerja sebesar 104.730 jiwa. Sementara itu, tingkat pengangguran sebanyak 5.829, pernah bekerja 3.774, dan tidak pernah bekerja sebesar 2.055.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,27 persen. Angka ini turun sebesar 1,04 poin dibandingkan tahun 2021. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 4,84 persen dan penduduk perempuan sebesar 5,92 persen. Apabila dilihat dari jumlah angkatan kerja penduduk perempuan lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerja penduduk laki-laki. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, adanya kecenderungan yang lebih besar pada pekerja perempuan di Kota Tanjungpinang yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan beralih menjadi pengangguran dibanding pekerja laki-laki. Hal ini merujuk pada TPT penduduk perempuan yang lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Namun dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh dapat pula disimpulkan bahwa penduduk perempuan hampir sama aktifnya dengan penduduk laki-laki dalam mencari pekerjaan.

Selanjutnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau alasan lainnya masuk kedalam kategori bukan angkatan kerja. TPAK Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 yaitu sebesar 65,37 persen. Jika dilihat persentase TPAK antara penduduk laki-laki dan perempuan sangat terlihat jelas bahwa penduduk perempuan lebih sedikit yang tergolong sebagai angkatan kerja. Hal ini tercermin dalam TPAK penduduk perempuan yang hanya sebesar 52,98 persen. Sedangkan penduduk laki-laki sebesar 77,56 persen. Berikut Tabel penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas berdasarkan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin.



No	Ketenagakerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
<b>1</b>	<b>Angkatan kerja</b>	<b>66.106</b>	<b>44.453</b>	<b>110.559</b>
	Bekerja	62907	41.823	104.730
	Pengangguran	3.199	2.630	5.829
	Pernah bekerja	2.086	1.688	3.774
	Tidak pernah bekerja	1.113	942	2.055
<b>2</b>	<b>Bukan angkatan kerja</b>	<b>19.128</b>	<b>39.449</b>	<b>58.577</b>
	Sekolah	8.102	6.085	14.187
	Mengurus rumah tangga	6.577	31.171	37.748
	Lainnya	4.449	2.193	6.642
<b>3</b>	<b>Penduduk usia kerja</b>	<b>85.234</b>	<b>83.902</b>	<b>169.136</b>
<b>4</b>	<b>% Bekerja terhadap Angkatan Kerja</b>	<b>95,16</b>	<b>94,08</b>	<b>94,73</b>
<b>5</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>4,84</b>	<b>5,92</b>	<b>5,27</b>
<b>6</b>	<b>% Angkatan Kerja Terhadap penduduk Usia Kerja</b>	<b>77,56</b>	<b>52,98</b>	<b>65,37</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, angkatan kerja kelompok umur 40-49 tahun memiliki jumlah terbesar terhadap seluruh jumlah angkatan kerja di Kota Tanjungpinang tahun 2022, yaitu sebanyak 30.853 jiwa. Pada usia ini penduduk telah mencapai umur produktif yang tergolong sudah matang. Karena pada usia ini penduduk sudah bukan termasuk muda namun juga belum tergolong penduduk tua. Angkatan kerja yang memiliki jumlah terbesar selanjutnya yaitu pada kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 24.642 jiwa. Dari segi jumlah selisih antara penduduk laki-laki dan perempuan yang tergolong sebagai angkatan kerja cukup signifikan yaitu sebanyak 21.653 jiwa. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang termasuk Angkatan kerja menurut golongan umur dan jenis kelamin.

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	2 140	2 464	4 604
20-29	13 015	8 746	21 761
30-39	15 583	9 059	24 642
40-49	17 545	13 308	30 853
50-59	12 709	7 426	20 135
60+	5 114	3 450	8 564
<b>Jumlah</b>	<b>66 106</b>	<b>44 453</b>	<b>110 559</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Kemudian apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka angkatan kerja terbesar di Kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA, yaitu berjumlah sebanyak 29.097 jiwa yang terdiri dari 20.390 penduduk laki-laki dan 8.707 penduduk perempuan. Angkatan kerja yang berpendidikan tertinggi SD dan tidak/belum tamat SD menempati peringkat kedua terbanyak yaitu sejumlah 28.958 jiwa, terdiri dari 16.718 penduduk laki-laki dan 12.240 penduduk perempuan. Sedangkan angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi Diploma I/II/III merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan lainnya, yaitu hanya 2.891 jiwa terdiri dari 773 penduduk laki-laki dan 2.118 penduduk perempuan. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang termasuk Angkatan kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin.

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
≤SD	16 718	12 240	28 958
SMP	9 879	7 197	17 076
SMA	20 390	8 707	29 097
SMK	11 325	7 445	18 770
Diploma I/II/III	773	2 118	2 891
Universitas	7 021	6 746	13 767
<b>Jumlah</b>	<b>66 106</b>	<b>44 453</b>	<b>110 559</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Penduduk yang bekerja paling banyak di Kota Tanjungpinang terdapat pada kelompok umur 40- 49 tahun. Pada kelompok umur ini terdapat sebanyak 30.239 penduduk yang bekerja. Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada kelompok umur 40-49 tahun 2022 terdapat sebanyak 30.853 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok umur 40-49 tahun terdapat sebanyak 614 penduduk yang menganggur dan secara aktif mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang bekerja yang paling sedikit yaitu pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu hanya 3.134 jiwa. Jika dibandingkan dengan tabel angkatan kerja, pada kelompok umur 15-19 tahun terdapat sebanyak 1.470 jiwa yang menganggur dan secara aktif mencari pekerjaan. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut golongan umur dan jenis kelamin.

<b>Golongan Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	1 278	1 856	3 134
20-29	12 589	7 336	19 925
30-39	15 102	8 628	23 730
40-49	17 112	13 127	30 239
50-59	12 037	7 426	19 463
60+	4 789	3 450	8 239
<b>Jumlah</b>	<b>62 907</b>	<b>41 823</b>	<b>104 730</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka penduduk berumur 15 tahun ke atas terbanyak yang bekerja selama seminggu yang lalu di Kota Tanjungpinang tahun 2022 yaitu penduduk dengan pendidikan tertinggi SD dan tidak/belum tamat SD sebanyak 28.564 jiwa. Selanjutnya disusul dengan penduduk pendidikan tertinggi SMA yaitu sebanyak 26.962 penduduk. Selain itu, penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir Diploma I/II/III yang bekerja selama seminggu yang lalu merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan lainnya, yaitu hanya 2.540 jiwa. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin.

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
≤SD	16 422	12 142	28 564
SMP	9 650	7 074	16 724
SMA	19 245	7 717	26 962
SMK	9 940	6 574	16 514
Diploma I/II/III	773	1 767	2 540
Universitas	6 877	6 549	13 426
<b>Jumlah</b>	<b>62 907</b>	<b>41 823</b>	<b>104 730</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Berikutnya, penduduk yang bekerja berdasarkan 17 sektor lapangan pekerjaan utama. Lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Kota Tanjungpinang terdiri dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yaitu sebanyak 21.076 jiwa.

Kemudian diikuti dengan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 17.032 jiwa dan kategori berikutnya yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan penduduk yang bekerja sebanyak 12.017 jiwa. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas di Kota Tanjungpinang yang bekerja selama seminggu yang lalu paling banyak urutan pertama berada pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebanyak 10.003 jiwa disusul kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebanyak 9.453 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu paling banyak urutan pertama berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yaitu sebanyak 11.623 jiwa disusul kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu sebanyak 8.535 jiwa. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori) dan Jenis Kelamin, 2022.

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6 158	48	6 206
Pertambangan dan Penggalian	339	-	339
Industri Pengolahan	5 346	3 330	8 676
Pengadaan Listrik dan Gas	-	-	-
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	599	35	634
Konstruksi	8 208	134	8 342
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11 623	9 453	21 076
Transportasi dan Pergudangan	5 518	889	6 407
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7 029	10 003	17 032
Informasi dan Komunikasi	725	518	1 243
Jasa Keuangan dan Asuransi	963	731	1 694
Real Estat	181	41	222
Jasa Perusahaan	1 743	342	2 085
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8 535	3 482	12 017
Jasa Pendidikan	1 980	4 187	6 167
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	220	1 535	1 755
Jasa Lainnya	3 740	7 095	10 835
<b>Jumlah</b>	<b>62 907</b>	<b>41 823</b>	<b>104 730</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022



Kemudian apabila dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, maka penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Tanjungpinang tahun 2022 yang bekerja selama seminggu yang lalu paling banyak berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebanyak 62.562 jiwa. Sedangkan penduduk berumur 15 tahun yang bekerja selama seminggu yang lalu paling sedikit berstatus sebagai pekerja bebas di pertanian dan non pertanian sebanyak 1.016 jiwa. Secara umum, jumlah penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, kecuali untuk yang berstatus sebagai pekerja keluarga. Hal ini menunjukkan pekerja berstatus sebagai pekerja keluarga paling banyak adalah perempuan, yaitu bekerja untuk membantu memperoleh penghasilan anggota keluarganya yang lain tanpa dibayar, seperti membantu pekerjaan suami atau orang tuanya. Tabel Penduduk Kota Tanjungpinang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2022.

<b>Status Pekerjaan Utama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	12 983	9 249	22 232
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	4 067	3 309	7 376
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2 322	1 998	4 320
Buruh/Karyawan/Pegawai	39 885	22 677	62 562
Pekerja Bebas di Pertanian dan Non Pertanian	655	361	1 016
Pekerja Keluarga	2 995	4 229	7 224
<b>Jumlah</b>	<b>62 907</b>	<b>41 823</b>	<b>104 730</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang merupakan pengangguran terbuka, maka secara umum penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran di Kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah yang pendidikan tertingginya SMK sebanyak 2.256 jiwa. Kemudian pengangguran dengan tingkat pendidikan SMA merupakan terbanyak kedua yaitu sebanyak 2.135 jiwa.

Banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah ke atas menunjukkan bahwa tidak terdapat banyak lapangan usaha yang dapat menyerap pengangguran meskipun sudah memiliki keterampilan yang mumpuni. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2022

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
≤SD	296	98	394
SMP	229	123	352
SMA	1 145	990	2 135
SMK	1 385	871	2 256
Perguruan Tinggi	144	548	692
<b>Jumlah</b>	<b>3 199</b>	<b>2 630</b>	<b>5 829</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari tabel dibawah, dapat dilihat bahwa jumlah orang yang menganggur sebanyak 14.467 jiwa, dimana terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 11.014 jiwa dan perempuan sebanyak 3.453 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 11.922 jiwa yang sedang mencari pekerjaan. Selain itu terdapat sebanyak 368 jiwa yang sedang mempersiapkan usaha. Dari keseluruhan pengangguran terdapat sebanyak 1.099 jiwa yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah angka pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan kurangnya lapangan usaha dan persaingan yang cukup ketat dalam memperoleh pekerjaan sehingga terdapat penduduk yang merasakan hal yang demikian. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021-2022 masih memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kota Tanjungpinang saat ini. Tabel Penduduk

Kota Tanjungpinang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka menurut Kategori Pengangguran Terbuka dan Jenis Kelamin, 2022.

<b>Kategori Pengangguran Terbuka</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Mencari Pekerjaan	2 862	2 536	5 398
Mempersiapkan Usaha	295	73	368
Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	42	21	63
Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3 199</b>	<b>2 630</b>	<b>5 829</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Di dalam konsep ketenagakerjaan, jam kerja seseorang terbagi menjadi tiga kategori yaitu pertama 0 jam, merupakan orang yang bekerja tetapi sementara tidak bekerja, kemudian kedua 1-34 jam adalah orang yang bekerja kurang dari jam kerja normal (pekerja paruh waktu), dan yang ketiga untuk jam kerja penuh/normal yaitu minimal 35 jam. Tabel menunjukkan bahwa angkatan kerja berdasarkan jam kerja di pekerjaan utamanya, dimana terdapat 4.233 jiwa yang berstatus sementara tidak bekerja, yang terdiri atas 3.080 pekerja laki-laki dan 1.153 pekerja perempuan.

Sedangkan untuk pekerja yang memiliki jam kerja di pekerjaan utamanya adalah 1-34 jam atau biasa disebut pekerja paruh waktu ada sebanyak 25.358 jiwa atau sebesar 24,21 persen dari total keseluruhan penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. Kemudian pekerja yang memiliki jam kerja minimal 35 jam (jam kerja penuh) ada sebanyak 75.139 jiwa atau sebesar 71,75 persen dari penduduk yang bekerja. Jika dibandingkan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, maka dari tabel di bawah menunjukkan bahwa pekerja laki-laki lebih banyak bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu pada pekerjaan utama, yaitu sebanyak 46.662 jiwa. Hal yang sama juga terjadi pada pekerja perempuan yang lebih banyak bekerja dengan jam kerja min 35 jam per minggu di pekerjaan utamanya yaitu sebanyak 28.477 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan perempuan untuk memilih bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit atau memilih pekerjaan paruh waktu. Tabel Penduduk Kota Tanjungpinang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jam Kerja Utama dan Jenis Kelamin, 2022.

<b>Jam Kerja Utama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
0	3 080	1 153	4 233
1-7	1 167	1 861	3 028
8-14	844	1 670	2 514
15-24	2 718	2 190	4 908
25-34	8 436	6 472	14 908
35+	46 662	28 477	75 139
<b>Total</b>	<b>62 907</b>	<b>41 823</b>	<b>104 730</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Selanjutnya jumlah penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja keseluruhan dan jenis kelamin. Jam kerja keseluruhan mencakup jam kerja pada pekerjaan utama dan jam kerja pada semua pekerjaan tambahan selama seminggu yang lalu. Dari tabel dibawah terlihat bahwa mayoritas penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki jumlah keseluruhan jam kerja diatas 35 jam, dengan jumlah sebanyak 75.805 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, dari 75.805 jiwa yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu terdapat sebanyak 46.746 penduduk laki-laki dan 29.059 penduduk perempuan. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jam Kerja Keseluruhan dan Jenis Kelamin, 2022. Tabel penduduk Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja keseluruhan dan jenis kelamin.

<b>Jam Kerja Keseluruhan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
0	3 080	1 153	4 233
1-7	1 167	1 790	2 957
8-14	809	1 598	2 407
15-24	2 753	1 923	4 676
25-34	8 352	6 300	14 652
35+	46 746	29 059	75 805
<b>Total</b>	<b>62 907</b>	<b>41 823</b>	<b>104 730</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022



Jumlah angkatan kerja laki-laki di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 berjumlah 66.106 jiwa, dimana angkatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan menganggur. Penduduk laki-laki di Kota Tanjungpinang yang bekerja pada tahun 2022 ada sebanyak 62.907 jiwa atau sebesar 95,16 persen dari total seluruh angkatan kerja laki-laki, sedangkan sisanya adalah pengangguran yaitu 3.199 jiwa atau sebesar 4,84 persen. Apabila dilihat dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka penduduk laki-laki Kota Tanjungpinang yang bekerja paling banyak pendidikan terakhirnya adalah SMA, yaitu sebesar 30,59 persen, kemudian disusul penduduk laki-laki dengan pendidikan tamat SD dan tidak/belum tamat SD sebesar 26,11 persen, penduduk laki-laki dengan pendidikan terakhir SMK sebesar 15,80 persen, penduduk laki-laki dengan pendidikan terakhir SMP sebesar 15,34 persen, kemudian pendidikan terakhir Universitas sebesar 10,93 persen, dan paling sedikit adalah Diploma I/II/III sebesar 1,23 persen. Dari seluruh angkatan kerja tersebut, pengangguran yang paling banyak terdapat pada kategori pendidikan SMK yaitu sebanyak 1.385 jiwa. Kemudian disusul oleh penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi SMA yaitu sebanyak 1.145 jiwa.

Selanjutnya, jumlah angkatan kerja perempuan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 berjumlah 44.453 jiwa, di antaranya penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 41.823 jiwa atau sebesar 94,08 persen dari total angkatan kerja perempuan sedangkan sisanya adalah pengangguran yaitu sebanyak 2.630 jiwa atau sebesar 5,92 persen. Apabila dilihat dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka penduduk perempuan Kota Tanjungpinang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak dengan pendidikan terakhir tamat SD dan tidak/belum tamat SD yaitu sebesar 29,03 persen, kemudian disusul penduduk perempuan dengan pendidikan terakhir SMA sebesar 18,45 persen, pendidikan terakhir SMP sebesar 16,91 persen, penduduk perempuan dengan pendidikan terakhir SMK sebesar 15,72 persen, kemudian penduduk perempuan dengan pendidikan terakhir Universitas sebesar 15,66 persen, dan paling sedikit adalah Diploma I/II/III sebesar 4,22 persen. Dari seluruh angkatan kerja tersebut, pengangguran yang paling banyak terdapat pada kategori pendidikan SMA yaitu sebanyak 990 jiwa. Kemudian disusul oleh penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi SMK yaitu 871 jiwa. Tabel Penduduk Perempuan Kota Tanjungpinang Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022.

<b>Pendidikan</b>	<b>Bekerja</b>	<b>Pengangguran</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
≤SD	12 142	98	12 240
SMP	7 074	123	7 197
SMA	7 717	990	8 707
SMK	6 574	871	7 445
Diploma I/II/III	1 767	351	2 118
Universitas	6 549	197	6 746
<b>Jumlah</b>	<b>41 823</b>	<b>2 630</b>	<b>44 453</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Untuk melihat kualifikasi pekerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikannya saja, perlu informasi lain terkait kemampuan lainnya, namun yang tercakup dalam Survei Angkatan Kerja Nasional hanya pendidikan tertinggi saja. Tabel di bawah menggambarkan angkatan kerja laki-laki dan perempuan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan status bekerja. Dari keseluruhan angkatan kerja di Kota Tanjungpinang yang berjumlah sebanyak 110.559 jiwa, terbagi menjadi penduduk yang bekerja sebanyak 104.730 jiwa dan pengangguran sebanyak 5.829 jiwa.

Dilihat dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerja di Kota Tanjungpinang didominasi oleh penduduk yang pendidikan tertingginya adalah tamat SD atau tidak/belum tamat SD yaitu sebanyak 27,27 persen. Sementara itu, pekerja dengan pendidikan tertingginya adalah SMA menempati posisi kedua yaitu sebesar 25,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja di Kota Tanjungpinang memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup namun tidak terlalu tinggi. Tabel Penduduk Kota Tanjungpinang Berumur 15 tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022

<b>Pendidikan</b>	<b>Bekerja</b>	<b>Pengangguran</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
≤SD	28 564	394	28 958
SMP	16 724	352	17 076
SMA	26 962	2 135	29 097
SMK	16 514	2 256	18 770
Diploma I/II/III	2 540	351	2 891
Universitas	13 426	341	13 767
<b>Jumlah</b>	<b>104 730</b>	<b>5 829</b>	<b>110 559</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

#### **b. Peninjauan Balai Latihan Kerja (BLK)**

Pertemuan Tim Kunker dengan pihak BLK Tanjungpinang diterima oleh Kepala UPTD BLKPP dan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu, Tim Kunker mendapat penjelasan langsung mengenai keadaan BLK di Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan secara khusus meninjau langsung keadaan fisik UPTD BLKPP Tanjungpinang.

Di Provinsi Kepulauan Riau ada beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja. Pertama, UPTD Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) yang terletak di Tanjungpinang. BLKPP ini berfungsi sebagai ujung tombak dalam memberikan pelatihan keahlian, kompetensi, dan kewirausahaan bagi masyarakat setempat. Kedua, satuan pelayanan BLK Karimun, ketiga UPTD BLK Kabupaten Natuna. BLK Komunitas ada dua; BLK Komunitas Mambaus Sholihin, terletak di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, memberikan pelatihan keahlian dan kompetensi bagi masyarakat khususnya bidang teknologi, informasi dan komunikasi (komputer) dan BLK Komunitas Hidayatullah, terletak di Daik Kabupaten Lingga, memberikan pelatihan keahlian dan kompetensi bagi masyarakat khususnya bidang *Fashion Technology* (menjahit). Berikut adalah tabel program pelatihan tahun 2021-2023 BLKPP Provinsi Kepulauan Riau.

TA	SUMBER	PAGU	PAKET KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
2021	APBN	1.059.934.000	12 PAKET	192
	APBD	5.406.228.850	30 PAKET	510
	TOTAL	6.466.162.850	42 PAKET	702
2022	APBN	1.044.800.000	18 PAKET	288
	APBD	4.495.146.900	28 PAKET	474
	TOTAL	5.539.946.900	39 PAKET	762
2023	APBN	907.970.000	12 PAKET	192
	APBD	3.507.235.946	20 PAKET	334
	TOTAL	4.415.205.946	32 PAKET	526

Sumber : BLKPP Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BLKPP Tanjungpinang; *pertama* keterbatasan sumberdaya, meliputi tenaga pengajar, fasilitas maupun anggaran untuk menyelenggarakan program pelatihan. *Kedua*, kesenjangan keterampilan. Adanya kesenjangan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan pasar kerja, sehingga diperlukan upaya untuk menyelaraskan pelatihan dengan permintaan pasar. *Ketiga*, perubahan teknologi. Dimana, perubahan teknologi yang cepat memerlukan penyesuaian dalam kurikulum dan materi pelatihan agar tetap relevan dengan perkembangan industri dan teknologi.

### c. BPJS Ketenagakerjaan

Capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang sudah sangat bagus, hal ini terlihat dari pertumbuhan angka *coverage share* tahun 2022 sebesar 71,13% dan tahun 2023 menjadi 77,36% (lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional), dari total jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 472,212 jiwa. Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait BPJS Ketenagakerjaan adalah membentuk Forum kepatuhan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang didalamnya terdiri dari instansi di Lingkungan Pemko dan instansi vertikal serta melakukan berbagai upaya diantaranya; sosialisasi bersama untuk pelaku usaha kecil dan mikro, sosialisasi bersama untuk pelaku koperasi, kunjungan bersama kepada perusahaan wajib belum daftar (PWBD), perlindungan pekerja rentannelayan dan guru TPQ serta PAUD se Kota Tanjungpinang dan perlindungan kepada peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang.

Jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun 2023 di Kota Tanjungpinang sebanyak 2.723. dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- Peserta aktif PU : 28.919 peserta
- Peserta tidak aktif PU : 19.835 peserta
- Peserta aktif BPU : 12.586 peserta
- Peserta tidak aktif BPU : 1.037 peserta
- Peserta aktif TKA : 20 peserta
- Peserta tidak aktif TKA : 129 peserta

Jumlah pekerja yang terkena PHK dan telah mencairkan JHT dalam dua tahun terakhir, tahun 2022 sebanyak 1.723 kasus, dengan jumlah santunan sebesar Rp.17.084.789.531,74, dan ditahun 2023 sebanyak 515 kasus dengan jumlah santunan sebesar Rp.8.035.149.900.46. Sementara itu, pekerja informal di Kota Tanjungpinang yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 sebanyak 12.586 pekerja atau setara 50,61%. Untuk target selanjutnya, 24.868 pekerja informal di Kota Tanjungpinang dapat terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar terhindar dari resiko sosial yang mungkin terjadi.

Dukungan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang antara lain :

- MOU Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 181/1.1.02/16/MoU/2022 tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 23 Desember 2022 (jangka waktu tiga tahun)
- Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- PKS antara Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 523/ 137/ 5.8.05/ 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Nelayan Kota Tanjungpinang pada tanggal 24 Februari 2023 (jangka waktu satu tahun)
- PKS antara Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 559/ 367/5.5.01/ 2023 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Juru Parkir di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tanggal 6 Juli 2023 (jangka waktu satu tahun)
- PKS antara Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dengan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 566/ 1/ 5.11.03/ 2024 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang



- Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 642 tahun 2023 tentang Forum kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang.

Ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya adalah

- a. Mayoritas yang belum menjadi peserta merupakan usaha sektor UKM yang perlu diberikan literasi lebih terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
- b. Para pelaku usaha belum tergabung dalam organisasi/ paguyuban sehingga harus disasar satu persatu

#### **IV. REKOMENDASI**

Berikut beberapa kesimpulan dan rekomendasi hasil kunjungan kerja ke Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau :

##### **Bidang Kesehatan :**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperhatikan pemenuhan sarana prasarana serta Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan di Kota Tanjung Pinang.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperhatikan ketersediaan tenaga Kesehatan khususnya dokter spesialis di Kota Tanjung Pinang.

##### **Bidang Ketenagakerjaan**

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja, termasuk memastikan infrastruktur ketenagakerjaan dan sumber daya manusia (SDM) bidang ketenagakerjaan terdistribusi secara merata baik dan merata.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera melakukan transformasi dan revitalisasi atas alat-alat peraga/ praktek yang ada di BLK-BLK pemerintah, agar target pemberian pelatihan kompetensi bagi calon pekerja terpenuhi secara optimal.
3. Komisi IX DPR RI meminta DJSN, BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan RI terus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan agar seluruh pekerja/ buruh baik Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
4. Komisi IX DPR RI mendorong peran yang lebih aktif dari pemerintah daerah dalam hal dukungan sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja, baik di sektor mandiri atau informal maupun pekerja formal melalui media konvensional maupun media digital/sosial media dan aparat pemerintah terkait.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Tanjungpinang ini kami sampaikan, atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta seluruh SKPD dan instansi yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Maret 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA TANJUNGPINANG  
KETUA TIM,  
ttd.**

**Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si**  
**A-425**